

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan : Pelabuhan No. Telp. & Faximile ( 0742 ) 21238

**KUALA TUNGKAL**



**LAPORAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUT**

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021**

Nomor : LHM-700/1239/ Isp

Tanggal : 15 November 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238  
E-mail: itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarakab.go.id/>

Kuala Tungkal, 15 November 2021

Nomor : LHM – 700/123/Isp  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Kepada Yth :  
Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
di -  
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dasar**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Tanggal Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021  
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dilaksanakan selama 4 (empat) hari kalender mulai tanggal 12 November 2021 s/d 15 November 2021.
3. Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021  
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Tujuan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021  
Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
5. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	<b>Sangat Memuaskan.</b>
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel</b>
3	BB	> 70 – 80	<b>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja.</b>
4	B	> 60 – 70	<b>Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.</b>
5	CC	> 50 – 60	<b>Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.</b>
6	C	> 30 – 50	<b>Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu ditingkatkan.</b>
7	D	> 0 – 30	<b>Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan.</b>

Berdasarkan hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai sebesar **63,18** dengan kategori **B**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di Lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
A	Perencanaan Kinerja	30%	23,33
B	Pengukuran Kinerja	25%	12,50
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,61
D	Evaluasi Internal	10%	4,50
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	12,25
	Jumlah	100%	63,18

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

1. Dokumen Perencanaan Strategis
  - a. Implementasi Renstra
    - Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
    - Dokumen Renstra belum direview secara berkala
2. Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
    - Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
    - Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala
    - Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
    - Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

**b. Pengukuran Kinerja**

1. Pemenuhan Pengukuran
  - Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
2. Kualitas Pengukuran
  - Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
  - Indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya
  - Ukuran (indikator) kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
  - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang
  - Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan
  - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
  - Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3. Implementasi Pengukuran
  - IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
  - Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya

- Hasil pengukuran (capalan) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- IKU belum direview secara berkala
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c. Pelaporan Kinerja

1. Penyajian Informasi Kinerja
  - Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Keandalan data realisasi kinerja ≤ 75%, dan masih diperlukan data-data dan dokumen pendukung atas validitas informasi kinerja.
2. Pemanfaatan Informasi Kinerja
  - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
  - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
  - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
  - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja

d. Evaluasi Internal

1. Pemenuhan Evaluasi
  - Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan, namun telah ada dokumen monitoring atas rencana aksi;
  - Hasil evaluasi atas rencana aksi belum ada, namun dokumen monitoring atas rencana aksi telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Bappeda dan Bagian ADP).
2. Kualitas Evaluasi
  - Evaluasi program yang dilaksanakan belum digunakan dalam menilai keberhasilan program
  - Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
  - Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
  - Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
  - Pemantauan atas rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
  - Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada sehingga belum dapat menunjukkan perbaikan setiap periode

3. Pemanfaatan Evaluasi
  - Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
  - Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

6. Tindaklanjut dari Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2021 yang belum ditindak lanjuti yaitu :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
    - Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
    - Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

#### B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran
  - Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
  - Indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya
  - Ukuran (indikator) kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
  - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang
  - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)
  - Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
2. Implementasi Pengukuran
  - Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya
  - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
  - IKU belum direview secara berkala
  - Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

#### C. Pelaporan Kinerja

1. Penyajian Informasi Kinerja
  - Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Keandalan data realisasi kinerja ≤ 75%, dan masih diperlukan data-data dan dokumen pendukung atas validitas informasi kinerja.

## 2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja

## 7. Rekomendasi

Kami merekomendasikan kepada **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

### A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Strategis
  - a. Implementasi Renstra
    - Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
    - Dokumen Renstra agar direview secara berkala
2. Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
    - Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
    - Rencana Aksi atas Kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala
    - Rencana Aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
    - Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

### B. Pengukuran Kinerja

1. Pemenuhan Pengukuran
  - Agar dibuat pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dengan didukung sumber data yang valid
2. Kualitas Pengukuran
  - Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV agar didukung dengan satuan ukur, formulasi perhitungan yang dapat diidentifikasi dan cara perhitungan yang disepakati banyak pihak
  - Indikator kinerja eselon III dan IV agar diselaraskan dengan indikator kinerja atasannya
  - Ukuran (indikator) kinerja individu agar mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
  - Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang

- Pengumpulan data kinerja agar dibuat Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang mengatur Pengukuran data kinerja secara berjenjang mulai dari eselon IV s.d eselon II dengan menggunakan sarana E- Sakip Tanjabar. Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dan untuk menentukan *reward* dan *punishment*
  - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
  - Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3. Implementasi Pengukuran
- IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
  - Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya
  - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*
  - IKU agar direviu secara berkala
  - Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

### C. Pelaporan Kinerja

1. Penyajian Informasi Kinerja
  - Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Informasi kinerja dalam Laporan kinerja agar dapat diandalkan.
2. Pemanfaatan Informasi Kinerja
  - Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan
  - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
  - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja
  - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian kinerja

### D. Evaluasi Internal

1. Pemenuhan Evaluasi
  - Agar dilakukan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi;
  - Setelah dilakukan Evaluasi terhadap Rencana Aksi, agar Hasil Evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kualitas Evaluasi
  - Evaluasi program yang dilaksanakan agar digunakan dalam menilai keberhasilan program
  - Evaluasi program agar memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
  - Evaluasi program agar memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
  - Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;

- Pemantauan atas rencana aksi agar memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;
  - Hasil evaluasi atas rencana aksi agar dapat menunjukkan perbaikan setiap periode
3. Pemanfaatan Evaluasi
- Setelah dilaksanakan evaluasi program, agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
  - Hasil evaluasi rencana aksi agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada **Dinas Perhubungan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan **Dinas Perhubungan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Arsip

**KERTAS KERJA EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	CATATAN
		Y	NILAI		
1	2	3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)					
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	30,00	77,75%	23,33		
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	10,00	81,25%	8,13		
1 Renstra SKPD telah disusun	2,00	100,00%	2,00		
2 Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK	
3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK	
4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK	
5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK	
6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK	
7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK	
8 Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK	
9 Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,50%	4,38		
10 Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK	
11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK	
12 Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK	
13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK	
14 Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK	
15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK	

16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK	
c.	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	3,00	58,33%	1,75		
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK	
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,50	OK	
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		C	0,50	OK	
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		20,00	76,00%	15,20		
a.	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	4,00	100,00%	4,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK	
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	
b.	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	10,00	85,00%	8,50		
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK	
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	OK	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75	OK	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75	OK	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	OK	

12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK	
c.	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	6,00	45,00%	2,70		
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan	T	-	OK	Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara		C	0,50	OK	Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0,50	OK	Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		C	0,50	OK	Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		25,00	50,00%	12,50		
<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>		5,00	81,25%	4,06		
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00		
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75		
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,50	OK	mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		12,50	50,00%	6,25		
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK	
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0,75	OK	
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK	
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		C	0,50	OK	Beberapa Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		C	0,50	OK	Beberapa PK Eselon III dan IV terbaru belum melampirkan Indikator kinerja eselon III dan IV

10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		C	0,50	OK	Beberapa PK Eselon III dan IV terbaru belum melampirkan Indikator kinerja eselon III dan IV
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		C	0,50	OK	Masih ada beberapa kinerja staf yang belum diukur
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK	mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK	Belum ada pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara tertulis
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK	Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>29,17%</b>	<b>2,19</b>		
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50	OK	IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-	OK	Belum ada monitor atas target kinerja eselon III dan IV
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		D	0,25	OK	Belum ada hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas yang didikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
19	IKU telah <i>direview secara berkala</i>		C	0,50	OK	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-	OK	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>70,71%</b>	<b>10,61</b>		
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>		
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00		
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK	
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>65,43%</b>	<b>4,91</b>		

5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	OK	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK	
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK	
8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK	
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK	Laporan Kinerja belum cukup menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK	
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK	Informasi kinerja tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum cukup
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,70</b>		
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK	
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50	OK	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50	OK	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50	OK	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>44,95%</b>	<b>4,50</b>		
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>71,00%</b>	<b>1,42</b>		

1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00		
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00		
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		C	0,34	OK	Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan, namun telah ada dokumen monitoring atas rencana aksi;
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50	OK	Hasil evaluasi atas rencana aksi ada, namun dokumen monitoring atas rencana aksi telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Bappeda dan Bagian ADP).
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>1,95</b>		
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0,50	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		D	0,25	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		D	0,25	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,34	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>1,13</b>		
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklaniuti untuk perbaikan		C	0,50	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklaniuti dalam bentuk		D	0,25	OK	Form e-81 belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut perbaikan per triwulan

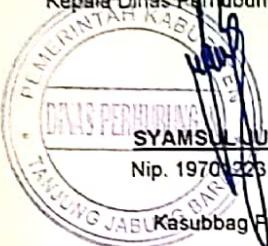
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>61,25%</b>	<b>12,25</b>		
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>80,00%</b>	<b>6,00</b>		
1 Target dapat dicapai		A	3,00		
2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00		
3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00		
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>125,00%</b>	<b>6,25</b>		
4 Target dapat dicapai			2,36		
5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,25		
6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,64		
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,00</b>	<b>63,18%</b>	<b>63,18</b>		

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

50,93

Disetujui Oleh :

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat



**SYAMSUL JUHARI, S.SOS**  
Nip. 19701228 199203 1 001

Kasubbag Perencanaan

**PITRIYANA, SH**

Nip. 19810502 200501 2 008

Evaluator :

Wakil Penanggung Jawab : EKO SUWELLO, ST  
NIP. 19741022 200501 1 010

Ketua Tim

: WIWIED WD, S.Farm., Apt., MPH  
NIP. 19821004 201101 2 006

Anggota

: Drs. M. YUNUS, MH  
NIP. 19650312 199303 1 004

: RAHMAH FERDIANTI, SE  
NIP. 19930220 201502 2 001

: HERI CAHYONO, SE  
NIP. 19791026 201502 1 001

: SARIBANUN  
NIP. 19720602 199402 2 003

: PRY HERLYANTO  
NIP. 19820611 200901 1 010